

## DAFTAR PUSTAKA

- Didarmadj Guna-an ibisn Renda Renda Bahasa Bandung  
Pngkasa
- Khadijah Sabari Maidar Gorsyad Sakura H Ridan Pembinaan  
Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia Jakarta Erlangga
- Hasilah haedar Dari Cicalengka Sampai Chicago Bunga  
Rampai Pendidikan Bahasa Bandung Pngkasa
- Hasan dkk Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Jakarta  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- riin ainal Berbahasa Indonesia lah dengan Benar Jakarta  
Mediyatama Sarana Perkasa
- riin ainal dan Somran Tasai Cermat Berbahasa Indonesia  
untuk Perguruan Tinggi Jakarta Mediyatama Sarana Perkasa
- riin ainal dan Arid Hadi Seribu Satu Kesalahan Berbahasa  
Jakarta Akademika Presindo
- Badudu JS dan Sutan Muhammad ain Kamus mum Bahasa  
Indonesia Jakarta Pustaka Sinar Harapan
- Badudu JS Membina Bahasa Indonesia Baku Seri Bandung  
Pustaka Prima
- Cakra ala Bahasa Indonesia Jilid dan Jakarta PT  
Gramedia  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Pedoman mum  
aan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan
- Djadjasudarma Tatima Metode Linguistik cancangan Metode  
penelitian dan Kaian Bandung PT Pres
- endi S Panduan Berbahasa Indonesia dengan Baik dan Benar  
Jakarta PT Dunia Pustaka Jaya
- Ihsan ur “ nalisis Kesalahan Penggunaan K njungsi dalam  
Skripsi Mahasiswa STKIP ember K laka” Tesis PPS nhas  
Makassar

Jamila Junia “ Analisis Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Disemurnakan dalam Karangan Siswa SMA Pembangunan Makassar” Tesis PPS khusus Makassar

Kamma sis “Penggunaan Bahasa Indonesia yang Disemurnakan dalam Bahanajar Diklat Prajabatan Golongan III Lembaga Administrasi Negara” Tesis PPS khusus Makassar

Kera Gorys “Diksi dan Gaya Bahasa” Jakarta Gramedia

“Komposisi” Indonesia Indah

Kridalaksana Harimurti “Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia” Jakarta Gramedia

Mustakim “Membina Kemampuan Berbahasa” Panduan ke arah Kemahiran Berbahasa Jakarta Gramedia

British John “Language Learners and Theirs Errors” London The Macmillan Press

Ugraha Setya Tri “Kesalahan Kesalahan Berbahasa Indonesia Pembelaar Bahasa Indonesia sebagai bahasa asing” Sebuah Penelitian Pendahuluan [http://autosearch.mns.m.res.nse.MT/analisis/Kesalahan/Berbahasa\\_srch/r/out/](http://autosearch.mns.m.res.nse.MT/analisis/Kesalahan/Berbahasa_srch/r/out/) diakses 00 mei

urhadi dan Reekhan “Dimensi Dimensi dalam Belaar Bahasa Kedua” Bandung Sinar Baru

Paransa Paturungi “Memenuhi Tradisi akademik (Kumpulan Orasi Ilmiah)” Jung Pandang Yayasan Bhakti Nusantara

Parera Jus Daniel “Leksikon Istilah Pembelaaran Bahasa” Jakarta Gramedia

Pran “Analisis Pengajaran Bahasa” Yogyakarta Gajah Mada University Press

Putrayasa Ida Bagus “Analisis Kalimat Fungsi, Kategori, dan Peran” Bandung Reika ditama

“Kalimat Efektif Diksi Struktur dan Logika” Bandung Reika ditama

Rak Abdul “Kalimat Efektif Struktur, Gaya, dan Variasi” Jakarta Gramedia

Samson Geoffrey *Model Linguistik Devisa Ini* Surabaya Sahasasi

Sibarani Robert *Hakikat Bahasa* Bandung Citra Bakti

Sugan Dendy *Buku Praktis Bahasa Indonesia* Jilid 1 dan 2 Jakarta Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

*Berbahasa Indonesia dengan Benar* Jakarta PT Penebar Sada

Syaie Imam “ Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia dalam Menulis Mahasiswa IKIP Malang IKIP Surabaya dan IKIP Jakarta” Disertasi Fakultas Pasasarjana IKIP Malang Malang

Sedjit dan Mansur Hasan *Keterampilan Menulis Paragraf* Bandung Remaja Karya

Sukandarrumidi *Metodologi Penelitian* Jogyakarta Gajah Mada University Press

Tarigan Henry Guntur dan Djag Tarigan *Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa* Bandung Angkasa

Tauik Muhammad “ Analisis Kesalahan Pemakaian bahasa Indonesia dalam Tesis dan Disertasi Mahasiswa Pasasarjana nhas” Tesis PPS nhas Makassar

## AMBA SAMBA

- Bertumbuhan ekonomi nasional di era informasi akan diwarnai oleh manfaat dari adanya pemanfaatan teknologi informasi seperti sudah diuraikan di atas.
- Peningkatan kualitas tentu dalam arti negatif dapat dilihat pada para para dan bentuk bentuk korupsi yang juga terus berkembang diarengi dengan keceranian melakukan yang terus menerus mencari cara baru melakukan korupsi.
- Dalam praktek juga kadang terjadi sesuatu kasus yang dianggap perlu untuk didengar keterangan ahli yang dituturkan untuk pemuktian suatu perkara pidana tetapi justru tidak dianjurkan baik oleh penuntut umum maupun terdakwa.
- Dari penanganan yang begitu bagus serta optimal terhadap pemungutan retribusi daerah dapat memerikan konsekuensi penerimaan daerah akan rendah dan jauh lebih kecil dibandingkan dengan sumber potensi yang ada.
- Sementara itu merupakan kenangan terwujudnya pembangunan di daerah karena tanda tanda daerah yang optimal maka pemerintah tidak mungkin bisa mewujudkan masyarakat adil dan makmur di daerah.
- Sektor wisata Kabupaten Bana Raja sebenarnya ditunjang juga oleh keantikan alamnya tetapi pemerintah daerah belum mengelolanya secara profesional.
- Hotel hotel antik dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Bana Raja tetapi pemerintah daerah dan pengusaha keliatannya belum siap mewujudkannya.
- Bukan saatnya kita berangku tangan dan berdiam diri memandang fenomena kejahatan kesusilaan terhadap perempuan utamanya tindak pidana perkosaan adalah hal biasa sekarangla saatnya kita menganalisa keenderungan delik kejahatan terhadap perempuan agar dapat dirolek hasil komrensimenangkut tindakan pencegahan dan penanggulangan dari kejahatan kejahatan perkosaan ini.
- Di satu sisi ilmu dan teknologi kedokteran telah demikian maju sehingga mampu memcertakan fidu seseorang walaupun yang istilanya fidu secara vegetatif. Sedangkan di sisi lain pengetahuan dan keadaan masyarakat terhadap hak hak individu juga sudah sangat berubah.
- Fasilitas dimaksud adalah antara lain berupa perumahan yang akan diuni oleh seorang pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Tidak dapat diungkiri bahwa sumber daya alam khususnya sumber daya alam tak terbarukan masi merupakan salah satu primadona sekaligus tulang punggung ekonomi daerah untuk mendukung pembangunan.
- Ini dapat terjadi karena dokter umumnya meliat pasien hanya dari segi medik saja sedangkan pasien mungkin meliat dan memertimangkan dari segi lain yang tidak kalah pentingnya seperti keuangan siskis agama pemertimangan keluarga dan lain lain.

- Kesalahan ini muncul karena karena teratasnya keamanan umum tentang otonomi daerah atau juga karena argumentasi argumentasi politik ketimang keilmuan.
- Di era pasca reformasi seperti sekarang ini masyarakat semakin terbuka peluang untuk secara sadar dan sistematis mengemban peraturan perundangundangan yang bernuansa keagamaan.
- Dalam konteks yang lebih luas peradilan atau sapa negara adalah merupakan salah satu lembaga peradilan khusus di dalam lingkungan Mahkamah Agung yang berperan untuk memina memurnikan dan menetikan aparaturnegara di bidang atau sapa negara agar menjadi alat yang efisien efektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang berdasarkan substansi peraturan perundangundangan.
- Dengan adanya undangundang pokok atau tentang hak daerah dan petrusi daerah dimana sebagian besar sumbu sumbu pendapatan daerah yang otentis di dalam seingga daerah Kabupaten Kota semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan rutin dalam pelaksanaan pembangunan.
- Masalah lain secara aktual adalah masalah pengrusan dan pengrusan lembaga dimana pelaksanaannya tidak berdasarkan ada asal usul dan atas prakarsa masyarakat di desa desa bersangkutan.
- Karena korupsi sebagai suatu aksi yang ditamirkan sekelompok orang tertentu dan dirasakan sebagai gejala tidak normal yang dapat merusak diri keiduan berangsa dan bernegara maka ada masyarakat dimana korupsi timbul merangsang kontra aksi dari masyarakat itu sendiri yakni reaksi sosial yang mengendaki agar gejala sosial ini ditanggulangi.
- Sebagai tindak lanjut dari ada ada itu kemudian dikeluarkan kebijakan pemerintah melalui Menteri Negara Koordinasi dan Menengah dengan surat nomor MK/KM yang mengusulkan penediaan kredit yang bersumber dari Surat perintah S.
- Penyelenggaraan pemerintahan ada akekatnya tidak terlepas dari prinsip prinsip manajemen modern dimana fungsi manajemen senantiasa berjalan secara stimulant dan profesional dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
- Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokok dari ada hutan dan kawasan hutan itu sendiri yakni fungsi lindung produksi dan konservasi.
- Hal ini disebabkan karena perubahan paradigma yang digunakan baik pada tataran filosofis dan fungsi maupun perkembangan dan situasi politik yang berkembang pada saat itu maupun saat ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Setelah otonomi daerah bergulir ada taun sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan yakni dari sistem setralisasi dan dekonsentrasi menjadi desentralisasi.
- Rencana strategis ini merupakan pedoman dan penuntun dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah sekaligus menjadi tolak ukur penilaian

- bertanggungjawab dan berhati setiak akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.
- Pada awal pemerintah Kabupaten Mambasa sangat memerlukan dana segar untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut.
  - Mengingat tujuan transfer dana ini yaitu untuk memperlakukan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan-pelayanan umum pada suatu tingkat tertentu dengan tarif-tarif tertentu maka transfer harus dapat menekankan kerugian-kerugian fiskal yang bersumber dari kepastian penerimaan yang lebih rendah dari biaya per unit yang lebih tinggi.
  - Untuk itu diperlukan metode penetapan tarif secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam urusan pemerantasan tindakan korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal intensif efektif profesional serta berkesinambungan.
  - Hanya saja meski telah ada lembaga-lembaga tersebut namun di pihak lain telah mulai merajalela kelompok dan oknum tertentu yang tidak peduli atas urusan kesejahteraan utan tersebut.
  - Kerja sama pihak pemerintah Kabupaten Mambasa dengan pihak swasta atau kontraktor dalam pelaksanaan proyek pembangunan diperlukan adanya persetujuan atau perjanjian.
  - Infrastruktur politik yang dibangun selama tiga puluh dua tahun pemerintah orde baru diakui telah meningkatkan stabilitas politik dan keamanan yang mantap.
  - Kondisi jalanan di Kabupaten Mambasa yang sebagian besar rusak berat seperti dikemukakan sebelumnya menimbulkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan.
  - Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas retribusi terminal Makale Kabupaten Mambasa selama tiga tahun terakhir samai dengan belum dapat mencapai jumlah yang ditargetkan karena selama kurang lebih tersebut belum maksimalnya optimalnya petugas pemungut retribusi.
  - Dalam Undang-undang no. 22 tahun 2001 tentang pemerintahan daerah pada dasarnya menekankan untuk terdapatnya desentralisasi dalam pembangunan dengan otonomi luas.
  - Dalam Undang-undang dasar 1999 yang sudah diamendemenkhususnya pasal 18 ayat 1 menjelaskan bahwa negara mengakui dan mengormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
  - Kawasan hutan yang dimiliki bangsa Indonesia yakni kurang lebih 100 juta hektar.
  - Dalam era globalisasi ekonomi dimana batas negara sudah menjadi tidak jelas dan saling ketergantungan antara negara maju dengan negara berkembang melirakan hubungan bisnis yang semakin kompleks.
  - Dasar pemikiran utama mengenai pemerintah desa dalam era otonomi daerah yaitu keanekaragaman dan otonomi asli.

- Jika melihat kondisi mana Koraja yang sangat potensial tersebut maka implementasi hasil kunjungan retribusi tempat rekreasi seharusnya menaiki target sehingga dapat menunjang dan meningkatkan PA. Sedangkan kunjungan retribusi yang khusus mengenai olahraga di mana Koraja belum dilakukan karena objeknya belum tersedia.
- Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa amedemen PPPP telah memaika konsekuensi perubahan struktur ketatanegaraan di Indonesia.
- Keinginan Pemerintah pusat untuk menelenggarakan atau mengelola penanaman modal di daerah setelah bergulirnya otonomi daerah tinggal membuat keijakan dasar melalui penguatan peraturan penanaman modal. Sedangkan daerah berenang untuk menindaklanjuti dalam bentuk aturan pelaksanaan yang dituangkan melalui peraturan daerah.
- Malauun ilaia Indonesia terisa satu sama lain dalam bentuk kekuluan namun tidak menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia untuk saling berubungan, berkomunikasi dan berinteraksi dalam melakukan berbagai kegiatan bersama.
- Malauun perubahan mengakibatkan tekanan jutaan manusia dan penderitaan yang luar biasa selalu dikutuk dan diatasi peggunaannya dengan sejumlah instrumen internasional dan sanksi yang berat namun sering selalu terjadi.
- Dalam emeriksaan mengenai hak asasi manusia sebenarnya tidak terlepas aia yang disebut hak untuk menentukan nasib sendiri pada diri asien.
- Malauun al ini nampaknya masih ana merukan seatas arahan bagi masyarakat di daerah namun bukan berarti aia imian ini tidak dapat direalisasikan dan ungkapan ini merukan seua tantangan yang perlu segera disikapi oleh Pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- Dimana PPP merukan salah satu sumber penerimaan keuangan daerah yang dapat memberi kontribusi terhadap dana peggunaan daerah mana Koraja namun ada kenataannya dalam pengelolaan PPP di daerah ini belum memerlihatkan hasil yang optimal sesuai target yang telah ditetapkan dan masih mengadaai berbagai permasalahan yang dapat menjadi pengamat dalam emeriksaan PPP.
- Dari asal PPP KH berdata akan menjadi syarat sahnya suatu perjanjian pengamatan sebagaimana akan diapas di dalam tulisan ini.
- Dari asal tersebut selanjutnya akan menjadi dasar embasan tentang perjanjian pengamatan antara pemberi jasa dengan penerima jasa kesehatan.
- Selain dapat memaikan sebagian masalah dana dan tenaga dalam lingkup lokal peran serta masyarakat dapat pula menanggulangi konflik yang sering terjadi antara masyarakat dengan pengelola kaasan.
- Agar selalu terjadi keseimbangan antara kemampuan menyediakan lahan baku dengan industri pengolaannya maka pengaturan eminaan dan pengemangan industri pengolaan ulu hasilutan diatur oleh menteri yang memidangi kkeutanan.

- Hal ini disebabkan karena tidak didukung sistem yang sistematis, pengorganisasian serta kemampuan sumber daya aparatur pengelola dan fasilitas pendukung operasional yang belum memadai.
- Perubahan peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai kejahatan di bidang teknologi informasi yang dapat dipakai menjerat kejahatan *computer crime* dengan perubahan pasal yang diatur dalam KUHUK (Kita Undang-Undang Hukum pidana)
- Seiring dengan itu, pasal-peraturan daerah tersebut lebih menegaskan bahwa Rencana Strategis pembangunan daerah ini adalah merupakan landasan dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Ana Raja.
- ajak daerah menjadi strategis karenaajak daerah adalah merupakan barometer untuk mengukur kemampuan keuangan daerah, yakni apakah dapat melaksanakan otonomi atau tidak.
- Indonesia sebagai suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau-pulau besar dan kecil dan memunculkan pulau-pulau perairan yang dikelilingi oleh samudra-samudra yang sangat luas, yaitu Samudra Indonesia dan Pasifik dan juga diait oleh dua benua, yaitu Australia dan Asia Selatan.
- Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ana Raja berdasarkan peraturan pemerintah, UU, dan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Studi ini bertujuan untuk menganalisis dari segi hukum tentang pelaksanaan pemungutan pajak potong pajak di Kabupaten Ana Raja dan menganalisis mengenai perubahan faktor yang berpengaruh dalam proses pungutan pajak potong pajak di Kabupaten Ana Raja.
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari implementasi peraturan daerah nomor UU dan tentang pajak pengembalian dan pengelolaan badan-badan lain golongan terdapat peningkatan pendapatan Asli Daerah serta pertimbangan kesususna penerimaan pajak badan-badan lain golongan di Kabupaten Ana Raja.
- Salah satu penemuan yang sangat mendasar adalah menyangkut ketentuan yang dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari dan mengkaji kebenaran materiil dengan menuntumkan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang tertuang dalam pasal UU UU UU UU KUHUK
- Di era pasca reformasi seperti sekarang ini, masyarakat semakin terbuka peluang untuk secara sadar dan sistematis mengemban peraturan-perundang-undangan yang bernuansa keagamaan.
- Para penegak hukum akan mengemukakan data-data sebelum persidangan. Dalam hal ini mereka akan beras sebagai kasus yang muncul yang



- dianggap belum lengkap dan sebagai pertanggung jawaban dalam persidangan.
- Keputusan hukum kadang-kadang merugikan masyarakat kecil. Oleh karena itu bagi pejabat dan para pelaku korupsi seolah-olah dilindungi dari jeratan hukum.
  - Sebelum perjanjian ini disepakati kedua belah pihak perjanjian ini harus ditandatangani oleh kedua belah pihak terlebih dahulu disaksikan oleh saksi-saksi yang terkait dengan perjanjian tersebut.
  - Penelitian ini bertujuan menganalisis peraturan disiplin PNS dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah dalam mengamati kebijakan terkait disiplin PNS yang bertugas di lingkungan pemerintah daerah.
  - *Founding fathers* bangsa Indonesia dengan penuh hikmat dan bijak menemukankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara Pancasila.
  - Persyaratan tentang kelalaian adalah persyaratan yang secara umum di perlakukan samir dalam seluruh kontrak kecuali jika tidak tidak tela menusun persyaratan tertentu untuk melakukan *termination* atas suatu kontrak.
  - Dengan segala uji dan sukur keadairat Tuhan yang Maha Esa atas Anugerah kasih dan limpahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Analisis Hukum Kontrak Kerja Sama Investasi Terhadap Pemangungan Atas Dana Aset Pemerintah Daerah Kota Makassar”.
  - Dengan memanjatkan uji sukur penulis kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan-Nya yang selalu melimpah-Nya serta limpahan-Nya sehingga tesis ini dapat selesai dengan sempurna dan baik.
  - Rasa keil dan menengah yang terdapat di kabupaten kota dapat juga menampakkan endapan Asli daerah misalnya usaha jasa loga. Oleh karena pemerintah daerah belum mengelolanya secara maksimal.
  - Dengan adanya pengaturan tersebut maka penanaman modal khususnya penanaman modal asing (PMA) di Indonesia yang akan dilaksanakan usaha kerja sama dengan modal nasional meskipun pengaturan tersebut sedikit bertentangan dengan semangat yang ada dalam UU no. 1 tahun 2007 tentang penanaman modal asing (PMA) yang pada prinsipnya memerkenankan adanya penanaman modal asing secara langsung.
  - Kekerasan terhadap perempuan yang dianalogikan ke dalam bentuk kejahatan kesusilaan sudah lama terjadi namun sebagian besar masyarakat belum memahaminya sebagai bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia.
  - Sasaran pemerintah pada sektor telekomunikasi selama 2010-2014 adalah untuk menekan atau mengurangi jumlah daftar tunggu pelanggan dan memperluas jangkauan fasilitas telekomunikasi sampai daerah-daerah pedesaan.
  - Demikian pula sistem peminaian dan pengawasan terhadap bank-bank agar dapat terlaksana secara efektif maka kepenangan dan tanggung

- jabar mengenai perubahan bank yang semula berada pada Menteri Keuangan menjadi berada pada Timpan Bank Indonesia.
- Untuk mewujudkan kebijakan pemerintah tersebut maka keterlibatan perbankan sangat dibutuhkan dalam memberikan dukungan dana dan menjadi fasilitator/mediator terhadap pengusaha mikro/kecil atas kendala dan tantangan yang dialami bahkan diadanya.
  - Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran serta pengadilan hak asasi manusia sangat berpengaruh positif dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia khususnya dalam penyelesaian pelanggaran HAM.
  - Berlepas dari adanya dugaan penyimpangan APBANA Alokasi Umum Kabupaten/daerah memiliki otonomi sendiri-sendiri mengenai otonomi daerah termasuk implementasinya.
  - Adanya akirnya tidak selamanya proses pelayanan kesehatan berjalan mulus seperti yang diharapkan bahkan akan kali terjadi suatu keadaan akibat kematian atau komplikasi yang oleh pihak pasien diduga karena malpraktek sehingga perlu telaah seara cermat dan mendalam mengenai keterkaitan antara persetujuan tindak medik dengan tenaga kesehatan/dokter atas tindakan yang menimbulkan resiko medik.
  - Keaneekaragaman memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya setempat seperti lemang nagari/kampung/uta dan lain lain yang mempunyai makna yang sama dengan desa.
  - Berada dengan gugatan di pengadilan umum maka akan yang dapat dituntut di pengadilan tata saha negara ada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang tela merugikan kepentingan orang atau badan hukum berdata dinatakan batal atau tidak sah. Sedangkan tuntutan tambahan adalah berupa tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi khusus untuk sengketa kepegawaian.
  - Keputusan atas perumahan merupakan masalah yang rumit dan kompleks karena menyangkut aspek sosial ekonomi masyarakat, teknologi perkotaan, keterbatasan lahan, meningkatkan jumlah penduduk dan urbanisasi serta berbagai masalah yang terkait dengan pemukiman adalah satu kesatuan masalah yang tidak dapat diabaikan.
  - Peningkatan kuantitas dapat dilhat misalnya pada angka belaku dan jumlah uang yang dikorupsi yang dapat diketaui tidak termasuk korupsi yang banyak terjadi tetapi tidak terungkap.
  - Berdasarkan hasil penelitian penulis maka ditemukan bahwa upaya pemerantasan korupsi antara lain meliputi dibentuknya Komisi Pemerantasan Korupsi dilaksanakan pemuktian terbalik korupsi sebagai subjek hukum pengertian pegawai diperluas dan adanya tindakan tertentu selama proses perkara misalnya pemlokiran rekening tersangka dengan implementasi peran serta masyarakat dalam pemerantasan korupsi.
  - Namun fenomena menunjukkan bahwa penanganan dan pelaksanaan pungutan retribusi ijin tempat usaha di Kabupaten Bana Raja belum

- o ptimal sehingga mengakibatkan penerimaan pemerintah dari sektor retribusi ini belum berperan besar terhadap pendapatan daerah.
- Dalam penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia salah satu lembaga pemerintah yang memiliki wewenang kepada masyarakat adalah lembaga inspektorat yang mempunyai fungsi dan tugas serta kewenangan sebagai lembaga pengawas daerah terhadap hasil-hasil pembangunan.
  - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian asal pengelolaan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan ruko dasar di Kabupaten Kutai Bera berdasarkan hukum perjanjian.
  - Dalam rangka pembagian fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif tersebut juga ditentukan memiliki kekuasaan membuat undang-undang sehingga dapat dikatakan memiliki fungsi legislatif dan sekaligus fungsi eksekutif.
  - Disamping lemahnya koordinasi antara instansi pemerintah khususnya dalam penanganan proyek perusaahan dalam lokasi hutan yang meruakan salah satu dari sekian bencana yang terjadi konflik masyarakat dengan pemerintah serta masyarakat mengklaim sebagai tanah adat sedangkan pemerintah mengklaim sebagai lokasi hutan lindung.
  - Tindakan pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga meruakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat dan karena itu maka semua tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa.
  - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi bagaimana peranan sistem pemuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi bagaimana peran jaksa penuntut umum terhadap pemuktian terbalik.